

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BATU

Eduardus Edu, Abd. Rohman

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: eduardus.edu.bz@gmail.com

***Abstract:** Poverty is a problem faced by all countries in the world, including Indonesia. Therefore every country competes to strive for the welfare of its people. The Family Hope Program is a program that aims to break the chain of poverty, but in its journey there are many obstacles and problems which include data on recipients, distribution of aid, misappropriation of assistants and so on. This study aims to determine the evaluation of PKH and its inhibiting factors and supporters in the Social Service Office of Batu City. This study uses a qualitative descriptive approach with the technique of determining informants using snowball sampling, and data analysis is done by data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study indicate that this program is able to break the chain of poverty by helping recipients meet their daily needs. In addition, PKH is able to encourage recipients to comply with the terms and obligations provided as the main means of the education process. However, there are still other things that are used as material for evaluating the implementation of PKH, namely the accuracy of the targets of some PKH recipients whose data received from the center or BPS sometimes does not match the conditions in the field.*

***Keywords:** Policy Evaluation, PKH, Welfare*

Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu setiap negara berlomba-lombaberupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Program Keluarga Harapan sebagai program yang bertujuan memutuskan mata rantai kemiskinan, namun dalam perjalannya banyak sekali kendala dan masalah yang antara lain mencakup data penerima, penyaluran bantuan, penyelewengan pendamping dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi PKH serta faktor penghambat dan pendukungnya di Dinas Sosial Kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan *snowball sampling*, serta analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini mampu untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dengan membantu penerima memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu PKH mampu mendorong penerima mematuhi syarat dan kewajiban yang diberikan sebagai sarana utama proses edukasi. Namun demikian, masih ada hal lain yang menjadi bahan evaluasi pelaksanaan PKH yaitu ketepatan sasaran sebagian penerima PKH yang mana data yang diterima dari pusat atau BPS terkadang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, PKH, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua kalangan di lapisan dunia, masalah kemiskinan memang bukanlah hal yang mudah, namun setiap negara sangat pasti berupaya untuk mensejahterakan masyarakatnya, termasuk Indonesia yang menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari kemerdekaannya seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Di Indonesia sendiri masalah kemiskinan dan kesejahteraan semakin parah, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Indonesia periode september 2016 hingga maret 2017 mengalami kenaikan. Pemerintah harus mewujudkan kesejahteraan dengan menentaskan kemiskinan melalui sebuah program yang mumpuni, program yang mumpuni yang mampu meningkatkan derajat dan kualitas hidup manusia. Maka dari itu lahirlah Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program yang bertujuan memutuskan mata rantai

kemiskinan, meningkatkan taraf hidup manusia Indonesia senada dengan upaya *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Program ini memberikan bantuan pada KSM dengan catatan harus memiliki persyaratan yang diwajibkan, adapun persyaratan yang dimaksud adalah adalah yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Program pemerintah adalah program yang harusnya memiliki tujuan dan rencana pencapaian sehingga permasalahan yang terjadi dapat terjawab dan benar-benar sebagai solusi bukan hanya sebagai program pengisi agenda dan penggunaan anggaran semata, penerima program yang dipilih adalah rumah tangga yang sangat miskin, yaitu mereka yang berada di bawah 80% garis kemiskinan resmi saat itu. Karena program ini merupakan program rintisan maka cakupan awalnya pun sangat rendah. Tapi pemerintah mengklaim program keluarga harapan (PKH) efektif mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia (*CNNIndonesia*), namun seperti diungkap oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam *internationalpolicy* dari tahun 2007 sampai 2012, program ini hanya menjangkau 1,5 juta keluarga, dibandingkan dengan 60 juta keluarga miskin di Indonesia dan 6,5 juta keluarga yang di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2012 akhirnya PKH beroperasi pada setiap Provinsi yang ada di Indonesia, meskipun belum mampu menjangkau setiap Kabupaten dalam setiap Provinsi.

Dalam perjalanan PKH sebagai program jaminan sosial sejak 2007 sampai saat ini, banyak dinamika yang dialami baik kekurangan maupun kelebihan program ini, banyak berbagai masalah terjadi di seluruh Indonesia yang masuk dalam wilayah cakupan PKH ini. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan terlihat dari pertama, proses verifikasi yang sepenuhnya belum dilaksanakan, Masyarakat memprotes data penerima bantuan program keluarga harapan, mereka menilai uang yang di berikan tersebut tidak lah transparan. Masyarakat memprotes data yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan, (*palembang.tribunnews.com*). Permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu pihak puskesmas dan sekolah merasa keberatan untuk melakukan verifikasi secara kontinyu. Kedua, pembayaran kepada KSM tidak tepat waktu. Proses pencairan dana yang seharusnya dilakukan tepat waktu terkndala lambannya proses verifikasi. Ketiga, kurangnya koordinasi dari instansi pendukung, koordinasi yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Ketenagakerjaan belum terlaksana dengan baik. Akibatnya tidak semua keluarga sangat miskin (KSM) menerima jaminan kesehatan dan untuk orang miskin dan bantuan pendidikan untuk siswa miskin.

Terlepas dari masalah-masalah itu di Kota Batu penerima bantuan PKH mengalami kenaikan signifikan, menurut Koordinator PKH Kota Batu data terbaru yang ia miliki adalah berjumlah 2176 penerima, (*malangtoday.net*). Jumlah penerima semakin bertambah tetapi hasil masih menjadi tanda tanya. Semakin besar cakupan dan jumlah penerima maka semakin banyak pula tantangannya. Yang menjadi tanda tanya dan menyisakan pertanyaan bagi kita adalah, mengapa PKH yang sudah dimulai sejak 10 tahun lalu masih saja memiliki permasalahan di setiap tahunnya. Apakah yang terjadi sebenarnya, apa yang terjadi dengan proses pelaksanaannya dan bagaimana pemantauannya selama ini. Oleh karena masalah-masalah itu kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Keajahteraan masyarakat Kota batu”, dan peneliti mengevaluasi dengan menggunakan teori analisis kebijakan menurut Dunn dalam Setyawan, (2017:160) dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel: Kriteria Teori Analisis Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang di inginkan telah dicapai?	Unit pelayan

Efisiensi	Seberapa banyak usaha di perlukan unuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio <i>cost-benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria parito, kriteria kaldor-hicks, kriteria rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan publik memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil(tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.

Sumber: Dody Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik* (2017:160)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Bogdan dan Taylor (Moleong, 2016:4). Dengan lokasi penelitian pada Kesekretariatan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Dinas sosial Kota Batu, Malang, Jawa Timur dengan fokus penelitian Evaluasi pelaksanaan komponen kesejahteraan sosial program keluarga harapan (PKH) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Sumber data di peroleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder, serta pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan penentuan informan menggunakan teknik *Snowball Sampling*, dengan informan meliputi Kabid Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan sosial Ibu Lilik Fariha, Koordinator pendamping PKH Kota Batu Ibu Hana, pendamping PKH Kota Batu ibu Desi wahyu andayani, pendamping PKH Kota Batu Ibu Chy chy arnelita, dua KPM dari Desa Junrejo serta Ketua Rt 01 dan Rt 02 Rw 05.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan model interaktif dan dilakukan dengan terus menerus dengan langkah-langkah yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (Penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan). Data yang diperoleh dari analisis datatersebut diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dengan peneliti tetap sebagai instrumen utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Batu

Evaluasi kebijakan merupakan suatu bentuk proses penilaian pencapaian terhadap hasil kebijakan atau program yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan atau program dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, baik yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pusat. Evaluasi kebijakan publik diartikan sebagai produksi informasi nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan publik dengan kata lain evaluasi dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan publik, berbagai instrumen yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat, dampak dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya, dan kemajuan yang di capai kalau kebijakan publik tersebut dilanjutkan atau di perluas.

Sebelum membahas tentang hasil penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti akan terlebih dahulu mengulas penelitian terdahulu yang hampir serupa tentang PKH. Pertama Penelitian Herman Suasanto, (2016) program Studi Ilmu Kesejahteraan, fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan judul Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan untuk mengevaluasi program keluarga harapan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menjawab penelitian dengan data yang dicari dari beberapa sumber baik data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan yang dilaksanakan UPPKH Kecamatan Kebayoran Lama menunjukkan keberhasilan, dua komponen dari PKH yaitu pendidikan dan kesehatan sangat dirasakan sekali oleh KSM. Hadirnya UPPKH sangat membantu KSM dengan pelayanan yang diberikan terlebih dari segi informasi kegiatan dan jadwal pencairan, namun program ini sangat memberikan ketergantungan KSM terhadap bantuan yang diberikan. Dari penelitian ini banyak sekali KSM yang mengharapkan program ini dilanjutkan terus dan tidak dihentikan.

Kemudian Penelitian Muhtadin (2016) dengan judul evaluasi program keluarga harapan (PKH) dalam pengentasan pendidikan dan kesehatan, dengan studi kasus pada Desa Jatisawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode kuliitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam bidang pendidikan menunjukkan beberapa hal masih belum menunjukkan perubahan, penerima bantuan mau melakukan dan memenuhi komitmen karena takut akan sanksi yang akan diberikan. Dalam bidang kesehatan pelaksanaan belum bisa bersinergi dengan program kesehatan sosial lainnya.

Dengan demikian, apabila kebijakan dianggap memberikan nilai-nilai atau manfaat bagi penyelesaian suatu masalah, maka sekaligus akan memberikan sumbangan pada evaluator atau pengguna lainnya untuk membuat kebijakan publik selanjutnya. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batu sesuai kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dalam Setyawan, (2017:160):

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan

Efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan di capai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melakukan fungsi-fungsinya secara optimal. Untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan melihat sejauh mana hasil yang diinginkan telah dicapai. Dalam program ini, tujuan jangka panjangnya adalah memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, dan tujuan jangka pendeknya untuk membantu lansia dan penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan kesadaran pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan program ini mewujudkan dari syarat-syarat yang diberikan kepada penerima atau kpm, dilihat dari kepatuhan peserta sejauh ini program berjalan dengan baik terbukti dengan sangat rendahnya tingkat sanksi yang diberikan akibat pelanggaran syarat-syarat yang di berikan bahkan hampir tidak ada. Kemudian untuk lansia dan penyandang disabilitas setelah perogram ini berjalan menjadi lebih diperhatikan, dilihat dari adanya bantuan kursi roda dan alat bantu jalan yang sebelumnya tidak ada. Jadi, selain dengan bantuan tunai program ini juga menyediakan fasilitas untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat disimpulkan tingkat efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Batu ini sangat baik.

2. Efisiensi Program Keluarga Harapan

Efisiensi adalah kriteria yang membahas tentang biaya dan sasaran yang ingin dicapai, sebuah program dapat dikatakan efisien ketika tidak terjadi pemborosan. Pemborosan dalam hal ini berarti ketika suatu program yang dilaksanakan ternyata hasilnya sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses pelaksanaan program terlampau besar apabila dibandingkan dengan hasil yang ingin dicapai. Untuk mengukur tingkat efisiensi adalah dengan melihat seberapa banyak usaha atau biaya di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tingkat efisiensi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana program dapat dikatakan sangat baik. Jika dilihat secara umum dana yang ada sangatlah besar akan tetapi ketika sudah turun ke peserta atau KPM, setiap pesertanya hanya mendapatkan bantuan sejumlah Rp 500.000,-/bulannya. Kalau kita lihat memang jumlah yang begitu kecil, namun besarnya bukan menjadi poin penting dalam program ini tetapi tujuannya yang menjadi penting sebab besaran yang tidak terlalu besar ini mampu memaksa peserta untuk mematuhi syarat-syarat yang diajukan guna sebagai sarana edukasi untuk memutus mata rantai kemiskinan. Di sisi lain dalam proses pendampingan, program ini mendapatkan dukungan dari setiap elemen yang terlibat termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemberian uang jalan atau uang bensin kepada tenaga pendamping sebesar Rp 200.000,-/bulan, memang terbilang kecil tetapi dengan ini proses pendampingan menjadi lebih efisien.

3. Kecukupan Program Keluarga Harapan

Kecukupan merupakan salah satu tipe penting dalam penyelesaian masalah kebijakan. Berbicara tentang kecukupan kebijakan atau program berarti kita berbicara tentang seberapa jauh pencapaian hasil program yang diinginkan betul-betul memecahkan masalah yang ada di masyarakat atau dalam artian lingkup program ini seberapa jauh satuan bantuan yang di berikan memberikan manfaat secara cukup terhadap penerima atau KPM sesuai dengan kriteria evaluasi Dunn dalam Setyawan (2017:160). Tingkat kecukupan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana program dapat dikatakan baik. Sebab dengan adanya program keluarga harapan ini masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah, bantuan sebesar Rp 500.000,-/bulan ini cukup membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dalam pengelolaan bantuan ini akan diberikan pendampingan oleh setiap pendamping lapangan masing-masing sehingga tidak ada penyalahgunaan bantuan. Pendampingan dalam program ini yang berperan penting dalam upaya memastikan bantuan benar-benar dapat memecahkan masalah dan mewujudkan tujuan program.

4. Perataan Program Keluarga Harapan

Sebuah program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan cukup apabila biaya dan manfaatnya merata. Merata dalam hal ini berarti program berorientasi pada perataan atau dimana kebijakan yang diakibatkan serta usaha yang ditimbulkan secara adil didistribusikan. Untuk mengukur tingkat perataan adalah dengan melihat apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda. Dalam program ini semua aturan yang ada sudah ditetapkan dalam buku panduan pelaksanaan program bahkan penentuan penerima pun sudah ditentukan dari pusat, begitupun dalam penyaluran bantuan. Bantuan disalurkan dengan aturan yang sudah ada sehingga tidak akan ada perhatian khusus yang berbeda-beda kepada setiap peserta, bantuan sebesar Rp 500.000,-/bulan ini berlaku pada setiap penerima kecuali penerima atau peserta yang dikenai sanksi akibat tidak memenuhi syarat dan kewajibannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat perataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana program ini berjalan dengan baik.

5. Responsivitas Program Keluarga Harapan

Responsivitas merupakan analisis yang dapat memuaskan kriteria-kriteria lain, responsivitas masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok-kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya program. Untuk mengukur tingkat responsivitas adalah dengan melihat apakah hasil dari program memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai-nilai kelompok tertentu. Masyarakat menerima baik keberadaan program ini karena masyarakat menilai program pemerintah pasti memiliki tujuan yang baik. Dengan adanya program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat menilai pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka yang kurang mampu, dalam arti masyarakat sangat terbantu dan mengharapkan program ini tetap berjalan dan cakupannya semakin luas. Dari penjelasan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tingkat responsivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana Program cukup baik.

6. Ketepatan Sasaran Program Keluarga Harapan (KPH)

Ketepatan merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberikan oleh organisasi atau pemerintah, penilaian dengan cara mengevaluasi dampak kebijakan ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut. Untuk melihat tingkat adalah dengan melihat apakah hasil dan tujuan benar-benar bernilai guna bagi penerima dalam arti benar-benar tepat sasaran. Tingkat ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana program dapat masih sedikit kurang tepat. Adanya kekurangtepatan pada tingkat ketepatan sasaran ini diakibatkan karena rendahnya peran daerah mulai dari tingkat bawah sampai kepada Dinas Sosial dalam penentuan data penerima.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program Kementerian Sosial bukan program dari Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana program tidak termasuk dalam penentuan data, sehingga dengan data yang *Top down* bukan *Bottom up* ini mengakibatkan masih kurangnya tingkat ketepatan, meskipun pemberian bantuan benar-benar membantu sebagian besar penerima tetapi ada yang lebih membutuhkan lagi yang belum tersentuh dalam artian program ini bukan tidak tetap tetapi masih kurang dalam keakuratan data. Data rilis kementerian yang berasal dari BPS ini, terkadang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Semisal dalam kategori miskin yang digunakan, janda dikategorikan sebagai kategori miskin akan tetapi kenyataan dilapangan janda belum tentu identik dengan miskin karena ada janda yang mendapatkan bantuan tetapi memiliki banyak aset seperti tanah dan ruko. Dari paparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat ketepatan sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana program dapat dikatakan rendah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kota Batu.

1. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana program memperlihatkan pelaksanaan yang cukup baik. Hal tersebut dapat terjadi tentunya karena ada kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak tidak terkecuali masyarakat. Maka oleh sebab itu dalam pelaksanaan sebuah program pasti terdapat faktor pendukung yang dapat memberikan pengaruh terhadap program sehingga dapat terlaksana. Berbeda dengan berbagai program bantuan sosial sebelumnya yang berfokus pada bantuan tunai semata Program Keluarga Harapan ini didukung dengan adanya pendampingan.

pendampingan membantu penerima untuk memenuhi syarat dan kewajiban yang diberikan serta membantu penerima dalam mengolah dan melihat setiap kemungkinan potensi peserta dalam membangun usaha kecil dari bantuan yang diberikan, dengan adanya pendampingan ini dapat

membantu program untuk benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu adanya perhatian dari pemerintah daerah juga menjadi faktor pendukung terlaksananya program ini dengan baik, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial memberikan bantuan uang tunai dan seminar demi menunjang tenaga pendamping yang profesional. Dari penjelasan diatas jelas bahwa pendampingan dan perhatian dari pemerintah daerah menjadi pendukung dalam terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH) ini dengan baik.

2. Faktor Penghambat

Dalam mewujudkan setiap program atau kebijakan yang dirumuskan oleh organisasi maupun pemerintah memerlukan pemaksimalan dari komponen pelaksana serta koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait, seperti dalam Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kota Batu. Meskipun dalam pelaksanaannya program ini dinilai berjalan dengan baik, namun demikian tetap ada aspek kekurangan dan menjadi penghambat pelaksanaan program yang harus dibenahi untuk keberlanjutan kedepannya.

Dalam program ini masalah ketepatan sumber data dan fasilitas penunjang menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan program. Data yang diterima oleh pihak PKH Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana program tingkat daerah adalah data langsung dari pusat yang bersifat *top down* bukan *bottom up* sehingga terkadang data dapat saja berbeda dengan keadaan lapangan yang menyebabkan kesulitan pada saat diverifikasi. Kemudian fasilitas penunjang dan kapasitas ruangan menjadi permasalahan utama, kurangnya fasilitas penunjang semacam komputer dan sebagainya memaksa pendamping untuk menggunakan fasilitas pribadi yang dimana ketika fasilitas pribadi mengalami masalah maka akan ditanggung secara pribadi, dan disisi lain kurangnya kapasitas ruangan mengakibatkan tidak semua pendamping dapat di akomodasi dalam satu ruangan kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Kesejahteraan Masyarakat di Sekretariat UPPKH Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana program dapat dikatakan memiliki hasil yang baik sesuai dengan prespektif efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas. Program ini mampu untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu memutuskan mata rantai kemiskinan dengan membantu penerima bantuan serta mampu untuk membuat penerima bantuan mematuhi syarat dan kewajiban yang diberikan sebagai sarana utama proses edukasi penerima bantuan. Meskipun sebagian besar dari prespektif mengatakan pelaksanaan program ini baik namun tetap ada kekurangan pada prespektif ketepatan yang dimana ketepatan sasaran yang masih belum akurat. Tapi secara umum program ini telah berjalan denan baik.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat PKH di Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana program adalah adanya elemen pendampingan program, dengan adanya pendampingan ini dapat membantu program untuk benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan kemudian adanya dukungan dari pemerintah daerah juga membuat program dapat berjalan baik. Serta faktor penghambat PKH adalah Data yang diterima oleh pihak PKH Dinas Sosial Kota Batu sebagai unit pelaksana program tingkat daerah adalah data langsung dari pusat yang bersifat *top down* bukan *bottom up* sehingga terkadang data dapat saja berbeda dengan keadaan lapangan, kemudian kurangnya fasilitas penunjang dan kapasitas ruangan di kesekretariatan UPPKH untuk tenaga pendamping juga menjadi faktor pelamban atau penghambat program.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong. 2016. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosda. Bandung
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Inteligencia Media. Malang
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Muthadin. 2016. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Pendidikan dan Kesehatan*.(Online)<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/article/download/1082/772>. Diakses pada 29/11/2017. 20:48 Wib
- Susanto, Herman. 2016. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan*.(Online)<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32279/1/HERMAN%20SUSANTO.PDF>. Diakses pada 02/11/2017. 18:27 Wib